

## BAB IV

### ANALISIS DAN PEMBAHASAN

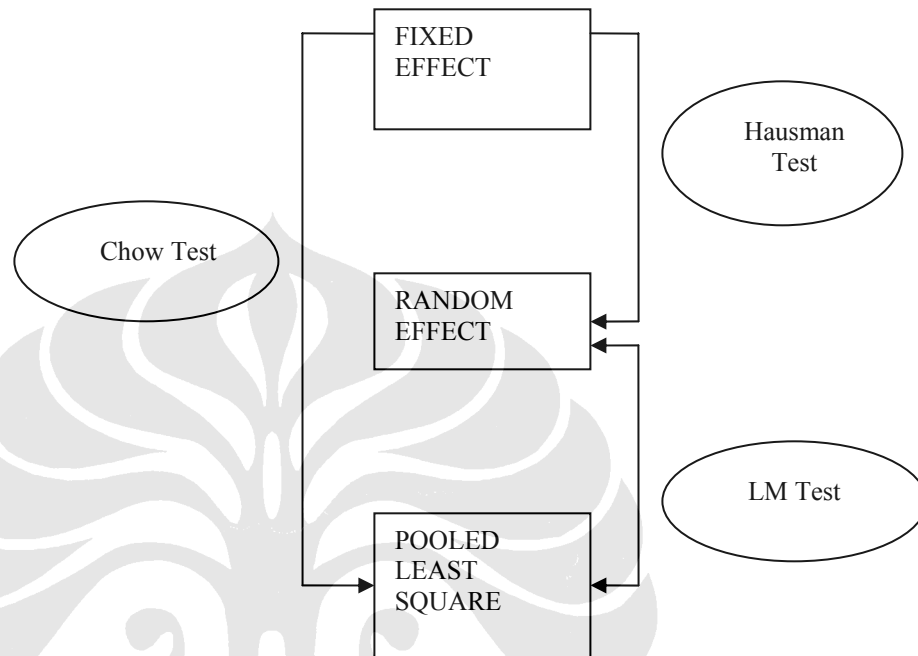
#### 4.1. Pengantar

Sesuai dengan permasalahan dan hipotesis penelitian yang akan dijawab dalam penelitian ini maka model ekonometri yang digunakan adalah model regresi. Model regresi tersebut digunakan untuk mengestimasi, yaitu:

1. Model 1 pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor publik (sektor pendidikan dan kesehatan) terhadap pembangunan manusia.
2. Model 2 pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor publik (sektor pendidikan dan kesehatan) terhadap kemiskinan.
3. Model 3 pengaruh pembangunan manusia terhadap kemiskinan.

Seperti yang telah diuraikan dalam metodologi penelitian, data yang digunakan adalah data panel, maka akan dianalisis dengan metode yaitu: *Pooled Least square* (PLS), efek tetap dan efek random. Setelah semua model dilakukan estimasi dengan masing-masing metode tersebut, selanjutnya dilakukan pemilihan metode yang terbaik untuk menghasilkan model yang tepat dengan uji tertentu. Dalam data panel, uji yang biasa digunakan adalah: uji Chow, Hausman dan uji LM. Secara singkat akan digambarkan sebagai berikut:

**Gambar 4.1. Pemilihan Model dalam Data Panel**



Sumber: Modul Pengolahan Data Panel - Laboratorium Komputer FEUI

Disamping itu, permasalahan penelitian lainnya yang akan dijawab dalam penelitian “Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Di sektor Publik Terhadap Peningkatan Pembangunan Manusia Dan Kemiskinan” adalah bagaimana nilai-nilai Islam mengatasi permasalahan umat di Indonesia terkait dengan rendahnya pembangunan manusia dan tingginya angka kemiskinan. Untuk itu diperlukan teknik analisis kualitatif untuk mengkaji dan memberi gambaran tentang permasalahan umat tersebut berdasarkan hasil penelitian ini disamping itu juga dengan studi pustaka dari beberapa literatur Islam.

#### **4.2 Hasil Analisis Data**

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, analisis data pada bagian ini ditujukan dalam rangka menjawab permasalahan dan hipotesis penelitian.

Teknik analisis kuantitatif digunakan untuk menjawab permasalahan dan hipotesis penelitian mengenai pengaruh dari pengeluaran pemerintah di sektor publik (pendidikan dan kesehatan) terhadap pembangunan manusia, pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor publik (pendidikan dan kesehatan) terhadap kemiskinan, terakhir menganalisis pengaruh pembangunan manusia terhadap kemiskinan. Sementara itu teknik analisis kualitatif digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian terkait dengan rendahnya pembangunan manusia dan tingginya angka kemiskinan dari aspek ekonomi Islam. Hal ini perlu dilakukan mengingat rendahnya pembangunan manusia dan tingginya kemiskinan merupakan permasalahan umat Islam di Indonesia. Sehingga untuk mengatasi permasalahan tersebut tidak terlepas dari nilai-nilai Islam yang harus ditanamkan dalam kehidupan baik itu oleh masyarakat maupun pemerintah. Mengingat kejayaan Islam masa lalu pun tidak terlepas dari nilai-nilai tersebut. Dengan ditanamkannya nilai-nilai secara islam dalam kehidupan membuat Islam mencapai puncak peradaban, dimana masyarakatnya hidup dalam kondisi sejahtera dan hilangnya kemiskinan.

#### **4.2.1. Analisis Data Panel Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Di Sektor Publik Terhadap Pembangunan Manusia**

Seperti yang diuraikan dalam metodologi penelitian, model regresi pertama yang akan dianalisis dalam penelitian ini menggunakan variabel pengeluaran pemerintah di sektor publik dan pembangunan manusia. Variabel pengeluaran pemerintah di sektor publik akan diukur dari alokasi pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan dalam anggaran pembangunan di APBN. Variabel pengeluaran di sektor pendidikan mengacu pada sektor 11, dan kesehatan masuk kepada sektor 13 (data tahun 1996, 1999, 2002 dan 2005). Yang dimaksud dalam sektor 11 yaitu pendidikan, pendidikan luar sekolah dan kedisnasan, kebudayaan nasional dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, serta pemuda dan olah raga. Misalnya program pendidikan dasar, program pembinaan pendidikan lanjutan, program pembinaan pendidikan

tinggi, program pendidikan luar sekolah dan lain-lain. Sementara itu sektor 13 meliputi kesehatan, kesejahteraan sosial, serta peranan wanita, anak dan remaja. Misalnya program pelayanan kesehatan masyarakat, program perbaikan gizi masyarakat, program penyuluhan kesehatan, program pemberantasan penyakit menular dan lain-lain. Sementara itu data pengeluaran sektor publik (pendidikan dan kesehatan) tahun 2005 mengacu pada format yang baru dari APBD dimana kedua sektor tersebut sudah merupakan sektor yang berdiri sendiri. Menurut penulis, walaupun ada perbedaan dalam format APBD tersebut, esensi tetap sama, yaitu untuk melihat seberapa besar alokasi anggaran untuk sektor pendidikan dan kesehatan dari keseluruhan pengeluaran pemerintah.

Setelah data pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan terkumpul kemudian dijumlah. Hasil penjumlahan kedua pengeluaran disebut pengeluaran publik. Selanjutnya pengeluaran sektor publik tersebut perlu dilakukan konversi. Hal ini disebabkan data pengeluaran pemerintah dalam APBN sebelum tahun 2000 masih disajikan menurut tahun anggaran, baru tahun 2000 menjadi tahun kalender. Data tahun anggaran dikonversikan menjadi tahun kalender dengan menggunakan rumus sederhana berikut, misalnya untuk tahun 1996 diperoleh dari perhitungan  $(25\% \times \text{pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan juga kesehatan tahun 1995/96}) + (75\% \times \text{pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan juga kesehatan tahun 1996/97})$ . Dengan demikian, secara implisit mengasumsikan bahwa pengeluaran untuk satu tahun anggaran terdistribusi merata untuk seluruh bulan (Brata, 2005). Setelah didapat angka pengeluaran pemerintah untuk kedua sektor tersebut kemudian dipersentasekan dengan total pengeluaran pemerintah.

Variabel pembangunan manusia akan diproksi dari *human development Index* atau dikenal dengan indeks pembangunan manusia. Indeks pembangunan manusia ini dipublikasikan oleh BPS yang menyajikan angka IPM tiap provinsi tahun 1996, 1999, 2003 dan 2005. Dalam indeks tersebut memuat tiga dimensi penting dalam pembangunan yaitu terkait dengan aspek pemenuhan kebutuhan

akan hidup panjang umur (*Longevity*) dan hidup sehat (*healthy life*), untuk mendapatkan pengetahuan (*the knowledge*) dan mempunyai akses kepada sumberdaya yang bisa memenuhi standar hidup. *Longevity* diukur dari angka harapan hidup, *knowledge* direpresentasikan oleh ukuran angka melek huruf dewasa dan rata-rata sekolah sementara akses terhadap sumberdaya diukur dari paritas kekuatan daya beli riil terhadap pendapatan perkapita.

Adapun rumusan model regresi yang digunakan untuk menganalisis pengeluaran pemerintah di sektor publik terhadap pembangunan manusia berdasarkan persamaan 1.1. adalah sebagai berikut:

$$PM_{it} = \alpha + \beta PSP_{it} + U_{it} \quad i=1,2, \dots, N ; \quad t=1,2, \dots, T$$

Dimana:

$PSP_{it}$  = pengeluaran sektor publik t untuk unit *cross section* i

$PM_{it}$  = pembangunan manusia t untuk unit *cross section* i

$u_{it}$  = Error

N = banyaknya observasi

T = banyaknya waktu

N x T = banyaknya data panel

Persamaan tersebut akan diselesaikan dengan menggunakan regresi sederhana data panel. Terkait dengan penggunaan regresi data panel tersebut, sejumlah tahapan serta langkah-langkah yang harus dilakukan seperti yang telah disebutkan pada bagian 4.1.

#### **4.2.1.1. Analisis Regresi Panel Data Dengan Intercept Common/Pooled Least Square (PLS)**

Bagian terpenting yang harus dilihat dalam pembentukan model dalam suatu model data panel adalah “*intercept*”, karena pada bagian inilah kita dapat membedakan metode yang digunakan, yaitu bisa , MET atau MER (Nachrowi dan Usman, 2006:326). Dengan digunakannya model PLS maka *intercept*-nya

tetap untuk setiap individu. Model ini mempunyai asumsi bahwa *intercept* ( $\alpha$ ) dan *slope* ( $\beta$ ) akan sama (konstan) untuk setiap data *time series* dan *cross section*. Hal tersebut nampak pada hasil *run* dari model PLS, sebagai berikut:

**Tabel 4.1.**  
**Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Di Sektor Publik**  
**Terhadap Pembangunan Manusia**  
**(Regresi Panel Data Dengan PLS)**

Dependent Variable: IPM?  
 Method: Pooled Least Squares  
 Date: 03/25/08 Time: 15:13  
 Sample: 1 4  
 Included observations: 4  
 Number of cross-sections used: 33  
 Total panel (unbalanced) observations: 115

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	68.15845	0.659660	103.3235	0.0000
PUB?	-0.197857	0.099782	-1.982884	0.0498
R-squared	0.033625	Mean dependent var	67.07217	
Adjusted R-squared	0.025073	S.D. dependent var	3.991121	
S.E. of regression	3.940768	Sum squared resid	1754.851	
F-statistic	3.931830	Durbin-Watson stat	0.723603	
Prob(F-statistic)	0.049807			

Pada tabel 4.1. dapat diketahui bahwa untuk model 1 dengan metode PLS memiliki nilai koefisien determinasi  $R^2 = 0,03363$ . Artinya variabel bebas yaitu pengeluaran pemerintah di sektor publik hanya mampu menjelaskan variasi dari variabel terikat yaitu pembangunan manusia sebesar 3,36 % sedangkan sisanya sebesar 96,64% dapat dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak diikutsertakan dalam model.

Dilihat dari Tabel Durbin Watson stat sebesar 0,72. Berdasarkan tabel Durbin Watson, maka nilai batas bawah  $d_L = 1,52$  dan batas atas  $d_U = 1,56$  (lihat tabel Durbin Watson pada  $\alpha = 0,05$ ) sehingga nilai 0,72 (nilai Durbin Watson pada tabel) lebih kecil dari nilai batas bawah ( $d < d_L$ ) berarti terdapat

korelasi positif dalam model 1 dengan metode PLS. Sedangkan hasil olahan data berdasarkan Metode *Fixed Effect* adalah sebagai berikut:

#### 4.2.1 2. Analisis Regresi Data Panel Dengan *Fixed Effect* (Metode Efek tetap/MET)

Seperti yang telah diketahui bahwa model berangkat dari asumsi pembuatan model yang menghasilkan *intercept* konstan untuk setiap individu (i) dan waktu (t) kurang realistis. Dalam metode efek tetap ini memungkinkan adanya perubahan *intercept* pada setiap i dan t. Hal tersebut nampak pada tabel 4.2.

**Tabel 4.2.**  
**Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Di Sektor Publik Terhadap Pembangunan Manusia (Regresi Panel Data Dengan MET)**

Dependent Variable: IPM?  
Method: Pooled Least Squares  
Date: 03/25/08 Time: 15:13  
Sample: 1 4  
Included observations: 4  
Number of cross-sections used: 33  
Total panel (unbalanced) observations: 115

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
PUB?	-0.089180	0.079257	-1.125192	0.2638
Fixed Effects				
_NAD--C	68.18503			
_SUMUT--C	69.79939			
_SUMBAR--C	68.82921			
_RIAU--C	70.71607			
_JAMBI--C	68.68514			
_SUMSEL--C	67.27270			
_BKL--C	67.82079			
_LPG--C	66.93853			
_BABEL--C	69.17099			
_KEPRI--C	72.32396			

_DKI--C	75.48679		
_JABAR--C	67.47681		
_JATENG--C	67.27102		
_DIY--C	71.58637		
_JATIM--C	65.57337		
_BANTEN--C	68.16507		
_BALI--C	68.72157		
_NTB--C	60.11816		
_NTT--C	61.71246		
_KALBAR--C	63.98872		
_KALTENG--C	70.53205		
_KALSEL--C	65.98104		
_KALTIM--C	70.95994		
_SULUT--C	71.42618		
_SULTENG--C	65.91577		
_SULSEL--C	66.28040		
_SULTRA--C	65.96764		
_GRTL--C	66.17411		
_SULBAR--C	66.05850		
_MLKU--C	68.17921		
_MULKUT--C	66.83163		
_IRJABAR--C	65.53395		
_PAPUA--C	60.82705		
R-squared	0.697382	Mean dependent var	67.07217
Adjusted R-squared	0.574093	S.D. dependent var	3.991121
S.E. of regression	2.604669	Sum squared resid	549.5282
Durbin-Watson stat	2.263012		

Pada tabel 4.2. dapat diketahui dengan MET nampak *intercept* untuk setiap individu berubah. Hal tersebut sangatlah realistis, mengingat tidak mungkin antara satu individu dalam hal ini propinsi mempunyai *intercept* yang sama. Hal tersebut terkait dengan kondisi masing-masing propinsi dalam kemampuannya mengalokasikan pengeluaran pemerintah daerahnya dalam sektor publik. Sebab lain, bisa saja karena berbagai faktor lain yang mempengaruhi besar kecilnya alokasi anggaran untuk sektor pendidikan dan kesehatan, yang memungkinkan perbedaan di tiap propinsi tersebut

Model 1 dengan metode efek tetap memiliki nilai koefisien determinasi  $R^2 = 0.697382$  Artinya variabel bebas yaitu pengeluaran pemerintah di sektor publik mampu menjelaskan variasi dari variabel terikat yaitu pembangunan manusia sebesar 69,74% sedangkan sisanya sebesar 30,26% dapat dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak diikutsertakan dalam model.



Dilihat dari Tabel Durbin Watson stat sebesar 2,26. Berdasarkan tabel Durbin Watson, maka nilai batas bawah  $d_L = 1,52$  dan batas atas  $d_U = 1,56$  (lihat tabel Durbin Watson pada  $\alpha = 0,05$ ). Berhubung  $d_U < d < 4-d_U$  sehingga nilai 2,26 (nilai Durbin Watson pada tabel) berada pada posisi tidak ada korelasi positif maupun negatif.

#### **4.2.1.3. Analisis Regresi Data Panel Dengan *Random Effect* (Metode Efek Random/MER)**

Sebagaimana kita ketahui pada MET, perbedaan karakteristik individu dan waktu diakomodasi pada *intercept* sehingga *intercept*nya berubah antar individu dan antar waktu. Sementara Model Efek Random (MER) perbedaan karakteristik individu dan waktu diakomodasikan pada *error* dari model. Variabel *error* tersebut terdiri dari dua komponen yaitu variabel *error* yang merupakan kombinasi antara *time series* dan *cross section* dan variabel *error* secara individu (Widarjono, 2007).

Dalam model ini ada asumsi yang menyatakan variabel *error* dari individu yang sama dalam periode yang berbeda saling berkorelasi. Karena adanya asumsi tersebut maka metode tidak bisa digunakan untuk mendapatkan estimator yang efisien. Metode yang tepat digunakan untuk mengestimasi MER tersebut adalah *Generalized Least Square* (GLS). Adapun hasil *run* dari GLS terlihat pada tabel 4.3.

**Tabel 4.3.**  
**Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Di Sektor Publik Terhadap Pembangunan Manusia (Regresi Panel Data Dengan MER)**

Dependent Variable: IPM?  
Method: GLS (Variance Components)  
Date: 03/25/08 Time: 14:54  
Sample: 1 4

Included observations: 4  
 Number of cross-sections used: 33  
 Total panel (unbalanced) observations: 115

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	67.69624	0.720693	93.93214	0.0000
PUB?	-0.113670	0.075829	-1.499027	0.1367
Random Effects				
_NAD--C	0.580567			
_SUMUT--C	1.824689			
_SUMBAR--C	1.035407			
_RIAU--C	2.642921			
_JAMBI--C	0.933990			
_SUMSEL--C	-0.295919			
_BKL--C	0.148422			
_LPG--C	-0.484729			
_BABEL--C	1.483725			
_KEPRI--C	3.880184			
_DKI--C	6.578533			
_JABAR--C	-0.102225			
_JATENG--C	-0.274843			
_DIY--C	3.326237			
_JATIM--C	-1.624477			
_BANTEN--C	0.496530			
_BALI--C	0.955496			
_NTB--C	-6.194841			
_NTT--C	-4.886290			
_KALBAR--C	-2.934223			
_KALTENG--C	2.464831			
_KALSEL--C	-1.214830			
_KALTIM--C	2.821652			
_SULUT--C	3.179140			
_SULTENG--C	-1.381216			
_SULSEL--C	-1.057236			
_SULTRA--C	-1.269039			
_GRTL--C	-1.181427			
_SULBAR--C	-1.281219			
_MLKU--C	0.494383			
_MULKUT--C	-0.620996			
_IRJABAR--C	-1.632009			
_PAPUA--C	-5.597056			
GLS Transformed Regression				
R-squared	0.584781	Mean dependent var	67.07217	
Adjusted R-squared	0.581106	S.D. dependent var	3.991121	
S.E. of regression	2.583133	Sum squared resid	754.0009	
Durbin-Watson stat	1.650409			

Pada tabel 4.3. dapat diketahui bahwa untuk model 1 dengan metode efek random memiliki nilai koefisien determinasi  $R^2 = 0.5848$ . Artinya variabel

bebas yaitu pengeluaran pemerintah di sektor publik hanya mampu menjelaskan variasi dari variabel terikat yaitu pembangunan manusia sebesar 58,48% sedangkan sisanya sebesar 41,52% dapat dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak diikutsertakan dalam model.

Dilihat dari Tabel Durbin Watson stat sebesar 1,65. Berdasarkan tabel Durbin Watson, maka nilai batas bawah  $d_L = 1,52$  dan batas atas  $d_U = 1,56$  (lihat tabel Durbin Watson pada  $\alpha = 0,05$ ) sehingga nilai 1,65 (nilai Durbin Watson pada tabel) berada pada posisi tidak ada korelasi baik positif maupun negatif.

#### 4.2.1.4 Pengujian Pemilihan Model Dalam Pengolahan Data Panel

Dalam penelitian model 1, hasil *run* yang baik adalah metode PLS dan metode efek tetap, sehingga akan dilakukan uji Chow. Hasil uji Chow telah dilakukan adalah sebagai berikut:

$$CHOW = \frac{(RRSS - URSS)/(N-1)}{URSS/(NT - N - K)}$$

Adapun pengujian ini dilakukan dengan hipotesa sebagai berikut:

$H_0$ : Model PLS (*Restricted*)

$H_1$ : Model *Fixed Effect (Unrestricted)*

Dasar penolakan terhadap hipotesa nol tersebut adalah dengan menggunakan  $F$  Statistik.

Berdasarkan penghitungan dengan menggunakan uji Chow didapat hasil 0,86652 sedangkan  $F_{table}$  sebesar 199,5, sehingga hasil Chow test < dari  $F_{table}$  maka  $H_0$  diterima atau  $H_1$  ditolak. Dengan demikian model yang digunakan adalah model dengan metode *pooled least square (PLS)*.

Kemudian dilakukan pengujian pelanggaran asumsi guna melihat apakah estimator model yang digunakan memenuhi syarat, yaitu tidak melanggar asumsi. Mengingat model yang digunakan merupakan regresi sederhana sehingga pelanggaran asumsi tersebut bisa terjadi karena adanya

heteroskedastisitas dan masalah autokorelasi. Jika terjadi pelanggaran, maka dilakukan perlakuan (*treatment*) guna mengatasi masalah.

Dengan dipergunakannya metode PLS maka akan digunakan analisa indikasi pelanggaran asumsi sebagai heteroskedastisitas. Uji tentang heteroskedastisitas tersebut diperlukan mengingat data panel mengandung juga data *cross section*, sehingga dicurigai ada heteroskedastisitas. Hal ini dapat terlihat setelah memberi perlakuan *white heteroskedasticity consisten covariance* pada model dengan menggunakan teknik *Generalized Least Square/GLS* (Widarjono, 2007: 225). Jika nilai *sum of squared resid* sebelum perlakuan lebih besar dari nilai setelah perlakuan, maka model awal itu mengalami masalah heteroskedastisitas. Selain itu, selain dengan melihat nilai *sum of squared resid* untuk memeriksa heteroskedastisitas, bisa terlihat juga dari standar *error* koefisien yang menjadi lebih rendah (Nachrowi dan Usman, 2006:336).

**Tabel 4.4.**  
**Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Di Sektor Publik Terhadap Pembangunan Manusia (Regresi Panel Data Setelah Perlakuan Heteroskedastisitas Dan Autokorelasi)**

Dependent Variable: IPM?  
Method: GLS (Cross Section Weights)  
Date: 04/02/08 Time: 21:02  
Sample: 1 4  
Included observations: 4  
Number of cross-sections used: 33  
Total panel (unbalanced) observations: 115  
White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	68.17365	0.243943	279.4653	0.0000
PUB?	-0.192796	0.043663	-4.415573	0.0000

Weighted Statistics

R-squared	0.995173	Mean dependent var	103.1757
Adjusted R-squared	0.995130	S.D. dependent var	56.46056
S.E. of regression	3.939980	Sum squared resid	1754.149
F-statistic	23297.31	Durbin-Watson stat	1.298348
Prob(F-statistic)	0.000000		

Berdasarkan tabel 4.4. terlihat bahwa nilai *sum of squared resid* berbeda sebelum dan sesudah perlakuan, walaupun tidak begitu besar, hal tersebut mengindikasikan ada heteroskedastisitas. Perubahan lainnya nampak dari koefisien standar *error* yang nilainya lebih rendah setelah mengalami perlakuan. Ini sekaligus menunjukkan bahwa heteroskedastisitas ada pada data awal. Dengan dipergunakannya teknik estimasi menggunakan GLS tersebut secara otomatis terbebas dari heteroskedastisitas dan autokorelasi mengingat estimator yang kita dapatkan mempunyai varian yang minimum atau efisien (Widarjono, 2007: 257). Setelah model tersebut bebas dari heteroskedastisitas, nilai  $R^2$  nampak berubah sangat signifikan dari awalnya 3,36% menjadi 99,5%. Artinya, variabel bebas yaitu pengeluaran pemerintah di sektor publik mampu menjelaskan variasi dari variabel terikat yaitu pembangunan manusia sebesar 99,5% sedangkan sisanya yang hanya 0,5% dapat dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak diikutsertakan dalam model.

#### **4.2.2. Analisis Data Panel Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Di Sektor Publik Terhadap Kemiskinan.**

Model kedua yang akan dianalisis adalah pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor publik terhadap kemiskinan. Seperti halnya dengan penjelasan pada model pertama mengenai pengeluaran pemerintah di sektor publik, maka penjelasan mengenai variabel ini tidak berbeda dengan model pertama. Sementara itu, variabel kemiskinan di *proxi* dari angka kemiskinan yang dipublikasikan oleh BPS di tiap-tiap provinsi dari tahun 1996, 1999, 2002 dan 2005.

Adapun rumusan model regresi untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor publik berdasarkan persamaan 1.2. adalah sebagai berikut:

$$K_{it} = \alpha + \beta PSP_{it} + U_{it} \quad i= 1,2, \dots, N; \quad t = 1,2, \dots, T$$

Dimana:

$$K_{it} = \text{kemiskinan } t \text{ untuk unit } \textit{coss section} \textit{ } i$$

$PSPX_{it}$  = pengeluaran sektor publik t untuk unit *cross section* i

$u_t$  = *Error*

N = banyaknya observasi

T = banyaknya waktu

N x T = banyaknya data panel

Persamaan tersebut akan diselesaikan dengan menggunakan regresi sederhana data panel. Terkait dengan penggunaan regresi data panel tersebut, sejumlah tahapan serta langkah-langkah yang harus dilakukan seperti yang telah disebutkan pada bagian 4.1.

#### 4.2.1.1. Analisis Regresi Panel Data Dengan *Intercept Common/Pooled Least Square (PLS)*

Seperti halnya dengan model 1 ketika meregresikan data panel, langkah pertama yang dilakukan adalah dengan mengasumsikan *intercept* dan *slope* adalah tetap antar individu dan waktu. Untuk itu metode yang digunakan adalah metode PLS. Hasil run dengan metode PLS untuk melihat pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor publik terhadap kemiskinan adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.5.**  
**Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Di Sektor Publik Terhadap Kemiskinan (Regresi Panel Data Dengan PLS)**

Dependent Variable: KMS?  
Method: Pooled Least Squares  
Date: 03/25/08 Time: 15:16  
Sample: 1 4  
Included observations: 4  
Number of cross-sections used: 31  
Total panel (unbalanced) observations: 113  
Cross sections without valid observations dropped

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	17.41053	1.652914	10.53323	0.0000
PUB?	0.101725	0.249936	0.407004	0.6848
R-squared	0.001490	Mean dependent var		17.96788
Adjusted R-squared	-0.007505	S.D. dependent var		9.803483

S.E. of regression	9.840204	Sum squared resid	10748.09
F-statistic	0.165652	Durbin-Watson stat	0.929784
Prob(F-statistic)	0.684789		

Pada tabel 4.5. dapat diketahui bahwa untuk model 2 dengan metode PLS memiliki nilai koefisien determinasi  $R^2 = 0,0015$ . Artinya variabel bebas yaitu pengeluaran pemerintah di sektor publik hanya mampu menjelaskan variasi dari variabel terikat yaitu kemiskinan sebesar 0,15% sedangkan sisanya sebesar 99,85% dapat dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak diikutsertakan dalam model.

Dilihat dari Tabel Durbin Watson stat sebesar 0,72. Berdasarkan tabel Durbin Watson, maka nilai batas bawah  $d_L = 1,52$  dan batas atas  $d_U = 1,56$  (lihat tabel Durbin Watson pada  $\alpha = 0,05$ ) sehingga nilai 0,93 (nilai Durbin Watson pada tabel) lebih kecil dari nilai batas bawah ( $d < d_L$ ) berarti terdapat korelasi positif dalam model 2 dengan metode PLS.

Sedangkan hasil olahan data berdasarkan Metode *Fixed Effect* adalah sebagai berikut:

#### 4.2.2.2. Analisis Regresi Data Panel Dengan *Fixed Effect* (Metode Efek tetap/MET)

Data panel dengan MET diasumsikan *intercept* dan *slope* berubah antar individu dan waktu. Adapun hasil *run* data untuk regresi pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor publik terhadap kemiskinan adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.6.**  
**Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Di Sektor Publik Terhadap Kemiskinan (Regresi Panel Data Dengan MET)**

Dependent Variable: KMS?  
Method: Pooled Least Squares  
Date: 03/25/08 Time: 15:17  
Sample: 1 4

Included observations: 4  
 Number of cross-sections used: 31  
 Total panel (unbalanced) observations: 113  
 Cross sections without valid observations dropped

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
PUB?	0.196630	0.201731	0.974715	0.3326
Fixed Effects				
_NAD--C	19.33922			
_SUMUT--C	13.82976			
_SUMBAR--C	10.22377			
_RIAU--C	10.76689			
_JAMBI--C	14.12033			
_SUMSEL--C	18.84886			
_BKL--C	17.97080			
_LPG--C	19.89963			
_BABEL--C	8.208356			
_KEPRI--C	10.69668			
_DKI--C	2.467059			
_JABAR--C	13.24929			
_JATENG--C	20.71707			
_DIY--C	18.05060			
_JATIM--C	19.42305			
_BANTEN--C	8.014573			
_BALI--C	5.622873			
_NTB--C	24.97513			
_NTT--C	30.64808			
_KALBAR--C	17.99908			
_KALTENG--C	11.21977			
_KALSEL--C	9.057179			
_KALTIM--C	12.02838			
_SULUT--C	11.61832			
_SULTENG--C	19.91815			
_SULSEL--C	13.13054			
_SULTRA--C	19.27756			
_GRTL--C	29.76014			
_MLKU--C	32.27627			
_MULKUT--C	12.67831			
_PAPUA--C	38.47541			
R-squared	0.669267	Mean dependent var	17.96788	
Adjusted R-squared	0.542691	S.D. dependent var	9.803483	
S.E. of regression	6.629572	Sum squared resid	3560.049	
Durbin-Watson stat	2.781327			

Pada tabel 4.6. dapat diketahui bahwa untuk model 2 dengan metode efek tetap memiliki nilai koefisien determinasi  $R^2 = 0.6692$ . Artinya variabel bebas yaitu pengeluaran pemerintah di sektor publik mampu menjelaskan variasi dari variabel terikat yaitu kemiskinan sebesar 66,92% sedangkan sisanya



sebesar 33,08% dapat dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak diikutsertakan dalam model.

Dilihat dari Tabel Durbin Watson stat sebesar 0,72. Berdasarkan tabel Durbin Watson, maka nilai batas bawah  $d_L = 1,52$  dan batas atas  $d_U = 1,56$  (lihat tabel Durbin Watson pada  $\alpha = 0,05$ ) sehingga nilai 2,78 (nilai Durbin Watson pada tabel) lebih besar dari 4- nilai batas bawah ( $d > 4 - d_L$ ) berarti terdapat korelasi negatif dalam model 2 dengan metode efek tetap.

#### 4.2.2.3. Analisis Regresi Data Panel Dengan *Random Effect* (Metode Efek Random/MER)

Hasil run data dengan menggunakan metode efek random, yaitu dengan teknik *Generalized Least Square* (GLS) adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.7.**  
**Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Di Sektor Publik Terhadap Kemiskinan (Regresi Panel Data Dengan MER)**

Dependent Variable: KMS?  
Method: GLS (Variance Components)  
Date: 03/25/08 Time: 15:18  
Sample: 1 4  
Included observations: 4  
Number of cross-sections used: 31  
Total panel (unbalanced) observations: 113  
Cross sections without valid observations dropped

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	17.00298	1.854439	9.168799	0.0000
PUB?	0.176109	0.191824	0.918076	0.3606
Random Effects				
_NAD--C	2.106263			

_SUMUT--C	-2.599000		
_SUMBAR--C	-5.608192		
_RIAU--C	-5.121401		
_JAMBI--C	-2.324249		
_SUMSEL--C	1.596078		
_BKL--C	0.849567		
_LPG--C	2.552866		
_BABEL--C	-7.160320		
_KEPRI--C	-5.265618		
_DKI--C	-12.11284		
_JABAR--C	-3.080584		
_JATENG--C	3.182060		
_DIY--C	0.953285		
_JATIM--C	2.150204		
_BANTEN--C	-7.449459		
_BALI--C	-9.459120		
_NTB--C	6.782001		
_NTT--C	11.52473		
_KALBAR--C	0.963602		
_KALTENG--C	-4.762580		
_KALSEL--C	-6.485014		
_KALTIM--C	-4.083782		
_SULUT--C	-4.453543		
_SULTENG--C	2.530237		
_SULSEL--C	-3.145722		
_SULTRA--C	2.051190		
_GRTL--C	10.77255		
_MLKU--C	12.88882		
_MULKUT--C	-3.544104		
_PAPUA--C	18.11219		
GLS Transformed Regression			
R-squared	0.561439	Mean dependent var	17.96788
Adjusted R-squared	0.557488	S.D. dependent var	9.803483
S.E. of regression	6.521433	Sum squared resid	4720.729
Durbin-Watson stat	2.100903		

Pada tabel 4.7. dapat diketahui bahwa untuk model 2 dengan metode efek random memiliki nilai koefisien determinasi  $R^2 = 0.5614$ . Artinya variabel bebas yaitu pengeluaran pemerintah di sektor publik mampu menjelaskan variasi dari variabel terikat yaitu kemiskinan sebesar 56,14% sedangkan sisanya sebesar 43,86% dapat dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak diikutsertakan dalam model.

Dilihat dari Tabel Durbin Watson stat sebesar 2,1. Berdasarkan tabel Durbin Watson, maka nilai batas bawah  $d_L = 1,52$  dan batas atas  $d_U = 1,56$  (lihat tabel Durbin Watson pada  $\alpha = 0,05$ ) sehingga nilai 2,1 (nilai Durbin

Watson pada tabel) berada pada posisi  $d_U < d < 4 - d_U$  sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada korelasi baik positif maupun negatif.

#### 4.2.2.4. Pengujian Pemilihan Model Dalam Pengolahan Data Panel

Dalam penelitian model 2 tentang pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor publik terhadap kemiskinan, hasil *run* yang baik adalah metode efek tetap dan metode efek random, sehingga akan dilakukan uji hausman. Pengujian hausman dilakukan dengan hipotesa sebagai berikut:

$H_0$ : *Random Effect Model*

$H_1$ : *Fixed Effect Model*

Sebagai dasar penolakan hipotesa nol tersebut digunakan dengan menggunakan pertimbangan statistik *chi square*. Hausman test dapat dilakukan sebagai berikut:

$$H = (\hat{\beta}_{RE} - \hat{\beta}_{FE})' (\Sigma_{FE} - \Sigma_{RE})^{-1} (\hat{\beta}_{RE} - \hat{\beta}_{FE})$$

Berdasarkan uji hausman tersebut diperoleh nilai hausman sebesar 0,1080094. Artinya probability hausman > nilai  $\alpha$  (0.05) maka  $H_0$  diterima. Dengan demikian metode yang paling tepat digunakan untuk model 2 adalah metode efek random.

Selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan model untuk metode efek random tersebut supaya model regresi yang dihasilkan telah memenuhi kriteria BLUE. Dalam model ini ada asumsi yang menyatakan variabel *error* dari individu yang sama dalam periode yang berbeda saling berkorelasi. Karena adanya asumsi tersebut maka teknik PLS tidak bisa digunakan untuk mendapatkan estimator yang efisien. Teknik yang tepat digunakan untuk mengestimasi MER tersebut adalah *Generalized Least Square* (GLS). Dengan terpilihnya metode efek random sebagai model yang tepat dalam mengestimasi model 2 (pengaruh pengeluaran sektor publik terhadap kemiskinan), maka teknik yang digunakan adalah dengan *Generalized Least Square* (GLS). Teknik

GLS ini secara otomatis sudah membebaskan model dari autokorelasi sehingga estimator yang kita gunakan tidak lagi mempunyai varian yang minimum atau tidak lagi efisien (Widarjono, 2007). Dengan demikian model 2 yaitu pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor publik (sektor pendidikan dan kesehatan) terhadap kemiskinan tidak mengandung masalah autokorelasi sehingga estimator yang kita dapatkan tidak lagi mempunyai varian yang minimum atau tidak lagi efisien.

Masalah lain terkait dengan harus terpenuhinya model supaya memenuhi kriteria BLUE, munculnya heteroskedastisitas. Hal ini dimungkinkan terjadi mengingat data panel mengandung data *cross section*. Namun dengan terpilihnya teknik estimasi dengan teknik GLS, masalah heteroskedastisitas pun dapat diatasi (Nachrowi dan Usman, 2006: hal.119-120). Dengan demikian model yang terpilih sudah terbebas dari heteroskedastisitas.

#### **4.2.3. Analisis Data Panel Pengaruh Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan.**

Model regresi ketiga yang akan dianalisis adalah pengaruh pembangunan manusia terhadap kemiskinan. Seperti halnya dengan penjelasan pada model kedua mengenai pembangunan manusia, maka penjelasan mengenai variabel ini tidak berbeda dengan model kedua. Begitu juga dengan variabel kemiskinan, dimana penjelasannya sudah di bahas di model regresi sebelumnya.

Rumusan model regresi yang digunakan untuk menganalisis pengaruh pembangunan manusia terhadap kemiskinan berdasarkan persamaan 1.3. adalah sebagai berikut:

$$K_{it} = \alpha + \beta PM_{it} + U_{it} \quad i= 1,2, \dots, N ; \quad t = 1,2, \dots, T$$

Dimana:

$$K_{it} = \text{kemiskinan } t \text{ untuk unit } \textit{cross section} \text{ } i$$

$PM_{it}$  = pembangunan manusia t untuk unit *cross section* i

$u_{it}$  = Error

N = banyaknya observasi

T = banyaknya waktu

N x T = banyaknya data panel

Persamaan tersebut akan diselesaikan dengan menggunakan regresi sederhana data panel. Terkait dengan penggunaan regresi data panel tersebut, sejumlah tahapan serta langkah-langkah yang harus dilakukan seperti yang telah disebutkan pada bagian 4.1.

#### 4.2.3.1. Analisis Regresi Panel Data Dengan *Intercept Common/Pooled Least Square (PLS)*.

Seperti halnya pada model regresi 1 dan 2, metode yang pertama kali digunakan dalam regresi data panel pada model 3 ini adalah metode PLS. Adapun hasil run data dengan metode ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.8.**  
**Analisis Pengaruh Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan (Regresi Panel Data Dengan PLS)**

Dependent Variable: KMS?  
Method: Pooled Least Squares  
Date: 03/25/08 Time: 15:18  
Sample: 1 4  
Included observations: 4  
Number of cross-sections used: 31  
Total panel (unbalanced) observations: 113  
Cross sections without valid observations dropped

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	115.5662	12.49649	9.247897	0.0000
IPM?	-1.454425	0.185894	-7.823931	0.0000
R-squared	0.355453	Mean dependent var		17.96788
Adjusted R-squared	0.349646	S.D. dependent var		9.803483
S.E. of regression	7.905973	Sum squared resid		6937.989
F-statistic	61.21390	Durbin-Watson stat		1.095807
Prob(F-statistic)	0.000000			

Pada tabel 4.8 dapat diketahui bahwa untuk model 3 dengan metode PLS memiliki nilai koefisien determinasi  $R^2 = 0.3555$ . Artinya variabel bebas yaitu pembangunan manusia mampu menjelaskan variasi dari variabel terikat yaitu kemiskinan sebesar 35,55% sedangkan sisanya sebesar 64,45% dapat dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak diikutsertakan dalam model..

Dilihat dari Tabel Durbin Watson stat sebesar 1,095. Berdasarkan tabel Durbin Watson, maka nilai batas bawah  $d_L = 1,52$  dan batas atas  $d_U = 1,56$  (lihat tabel Durbin Watson pada  $\alpha = 0,05$ ) sehingga nilai 1,095 (nilai Durbin Watson pada tabel) lebih kecil dari nilai batas bawah ( $d < d_L$ ) berarti terdapat korelasi positif dalam model 3 dengan metode PLS.

#### 4.2.3.2. Analisis Regresi Data Panel Dengan *Fixed Effect* (Metode Efek tetap/MET)

Setelah melakukan *run* data dengan menggunakan metode PLS untuk melihat pengaruh pembangunan manusia terhadap kemiskinan, kemudian run data dilanjutkan dengan menggunakan metode efek tetap. Hasil *run* data dengan metode efek tetap tersebut sebagai berikut:

**Tabel 4.9.**  
**Analisis Pengaruh Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan (Regresi Panel Data Dengan MET)**

Dependent Variable: KMS?  
Method: Pooled Least Squares  
Date: 03/25/08 Time: 15:35  
Sample: 1 4  
Included observations: 4  
Number of cross-sections used: 31  
Total panel (unbalanced) observations: 113  
Cross sections without valid observations dropped

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
IPM?	-0.957369	0.261452	-3.661738	0.0004
Fixed Effects				
_NAD--C	85.56562			
_SUMUT--C	81.05822			
_SUMBAR--C	76.62299			
_RIAU--C	79.17445			
_JAMBI--C	80.48258			
_SUMSEL--C	83.56267			

_BKL--C	83.14459		
_LPG--C	84.78108		
_BABEL--C	75.82897		
_KEPRI--C	80.09206		
_DKI--C	75.24949		
_JABAR--C	78.28841		
_JATENG--C	85.55193		
_DIY--C	87.06719		
_JATIM--C	82.97863		
_BANTEN--C	73.85389		
_BALI--C	71.97188		
_NTB--C	83.14564		
_NTT--C	90.24423		
_KALBAR--C	80.08790		
_KALTENG--C	79.31515		
_KALSEL--C	73.38687		
_KALTIM--C	80.53703		
_SULUT--C	80.40645		
_SULTENG--C	83.57375		
_SULSEL--C	77.24702		
_SULTRA--C	83.35941		
_GRTL--C	93.57989		
_MLKU--C	98.05320		
_MULKUT--C	77.19931		
_PAPUA--C	97.36686		
R-squared	0.712911	Mean dependent var	17.96788
Adjusted R-squared	0.603038	S.D. dependent var	9.803483
S.E. of regression	6.176679	Sum squared resid	3090.260
Durbin-Watson stat	2.549339		

Pada tabel 4.9. dapat diketahui bahwa untuk model 3 dengan metode Efek tetap memiliki nilai koefisien determinasi  $R^2 = 0,7129$ . Artinya variabel bebas yaitu pembangunan manusia mampu menjelaskan variasi dari variabel terikat yaitu kemiskinan sebesar 71,29% sedangkan sisanya sebesar 28,71% dapat dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak diikutsertakan dalam model.

Dilihat dari Tabel Durbin Watson stat sebesar 2,55. Berdasarkan tabel Durbin Watson, maka nilai batas bawah  $d_L = 1,52$  dan batas atas  $d_U = 1,56$  (lihat tabel Durbin Watson pada  $\alpha = 0,05$ ) sehingga nilai 2,55 (nilai Durbin Watson pada tabel) lebih besar dari 4 dikurangi nilai batas bawah ( $d > 4 - d_L$ ) berarti terdapat korelasi negatif dalam model 3 dengan metode efek tetap.

#### 4.2.3.3. Analisis Regresi Data Panel Dengan *Random Effect* (Metode Efek Random/MER).

Bagian akhir dari *run* data untuk melihat pengaruh pembangunan manusia terhadap kemiskinan adalah menggunakan metode efek random dengan teknik *Generalized Least Square* (GLS). Hasil *run* data tersebut adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.10.**  
**Analisis Pengaruh Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan (Regresi Panel Data Dengan MER)**

Dependent Variable: KMS?  
Method: GLS (Variance Components)  
Date: 03/25/08 Time: 15:35  
Sample: 1 4  
Included observations: 4  
Number of cross-sections used: 31  
Total panel (unbalanced) observations: 113  
Cross sections without valid observations dropped

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	100.3254	13.81560	7.261748	0.0000
IPM?	-1.227304	0.205212	-5.980676	0.0000
Random Effects				
_NAD--C	2.517367			
_SUMUT--C	-0.375684			
_SUMBAR--C	-3.828202			
_RIAU--C	-1.620675			
_JAMBI--C	-1.048685			
_SUMSEL--C	0.972864			
_BKL--C	0.785470			
_LPG--C	1.721149			
_BABEL--C	-4.483223			
_KEPRI--C	-0.544405			
_DKI--C	-3.519749			
_JABAR--C	-2.866416			
_JATENG--C	2.408602			
_DIY--C	4.361599			
_JATIM--C	0.135717			
_BANTEN--C	-5.997460			
_BALI--C	-7.260911			
_NTB--C	-0.793794			
_NTT--C	4.730866			
_KALBAR--C	-2.300289			
_KALTENG--C	-1.532543			
_KALSEL--C	-6.862556			
_KALTIM--C	-0.554587			
_SULUT--C	-0.531626			



_SULTENG--C	0.674839		
_SULSEL--C	-3.899934		
_SULTRA--C	0.468635		
_GRTL--C	8.060243		
_MLKU--C	11.72330		
_MULKUT--C	-3.806465		
_PAPUA--C	9.744792		
GLS Transformed Regression			
R-squared	0.611905	Mean dependent var	17.96788
Adjusted R-squared	0.608409	S.D. dependent var	9.803483
S.E. of regression	6.134751	Sum squared resid	4177.504
Durbin-Watson stat	1.831788		

Pada tabel 4.10 dapat diketahui bahwa untuk model 3 dengan metode efek random memiliki nilai koefisien determinasi  $R^2 = 0,6119$ . Artinya variabel bebas yaitu pembangunan manusia mampu menjelaskan variasi dari variabel terikat yaitu kemiskinan sebesar 61,19% sedangkan sisanya sebesar 38,81% dapat dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak diikutsertakan dalam model.

Dilihat dari Tabel Durbin Watson stat sebesar 1,83. Berdasarkan tabel Durbin Watson, maka nilai batas bawah  $d_L = 1,52$  dan batas atas  $d_U = 1,56$  (lihat tabel Durbin Watson pada  $\alpha = 0,05$ ). Berdasarkan hal tersebut  $d_U < d < 4 - d_U$  sehingga dapat disimpulkan tidak ada korelasi baik positif maupun negatif.

#### 4.2.3.4. Pengujian Pemilihan Model Dalam Pengolahan Data Panel

Dalam penelitian model 3 tentang pengaruh pembangunan manusia terhadap kemiskinan, hasil run yang baik adalah metode efek tetap dan metode efek random, sehingga akan dilakukan uji hausman. Pengujian hausman dilakukan dengan hipotesa sebagai berikut:

$H_0$ : *Random Effect Model*

$H_1$ : *Fixed Effect Model*

Sebagai dasar penolakan hipotesa nol tersebut digunakan dengan menggunakan pertimbangan statistik *chi square*. Hausman test dapat dilakukan sebagai berikut:

$$H = (\hat{\beta}_{RE} - \hat{\beta}_{FE})' (\sum_{FE} - \sum_{RE})^{-1} (\hat{\beta}_{RE} - \hat{\beta}_{FE})'$$

Berdasarkan uji hausman tersebut diperoleh nilai hausman sebesar 2,7762881. Artinya probability hausman  $>$  nilai  $\alpha$  (0.05) maka  $H_0$  diterima. Dengan demikian metode yang paling tepat digunakan untuk model 2 adalah metode efek random.

Selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan model untuk metode efek random tersebut supaya model regresi yang dihasilkan telah memenuhi kriteria BLUE. Dalam model ini ada asumsi yang menyatakan variabel *error* dari individu yang sama dalam periode yang berbeda saling berkorelasi. Karena adanya asumsi tersebut maka metode tidak bisa digunakan untuk mendapatkan estimator yang efisien. Metode yang tepat digunakan untuk mengestimasi MER tersebut adalah *Generalized Least Square* (GLS). Dengan terpilihnya metode efek random sebagai model yang tepat dalam mengestimasi model 2 (pengaruh pengeluaran sektor publik terhadap kemiskinan), maka teknik yang digunakan adalah dengan *Generalized Least Square* (GLS). Teknik GLS ini secara otomatis sudah membebaskan model dari autokorelasi sehingga estimator yang kita gunakan tidak lagi mempunyai varian yang minimum atau tidak lagi efisien (Widarjono, 2007). Dengan demikian model 3 yaitu pengaruh pembangunan manusia terhadap kemiskinan tidak mengandung masalah autokorelasi sehingga estimator yang kita dapatkan tidak lagi mempunyai varian yang minimum atau tidak lagi efisien.

Masalah lain terkait dengan harus terpenuhinya model supaya memenuhi kriteria BLUE, munculnya heteroskedastisitas. Hal ini dimungkinkan terjadi, mengingat data panel mengandung data *cross section*. Namun dengan terpilihnya teknik estimasi dengan teknik GLS, masalah heteroskedastisitas pun dapat diatasi (Nachrowi dan Usman, 2006: hal.119-120). Dengan demikian model yang terpilih sudah terbebas dari heteroskedastisitas.

#### **4.2.4. Pengujian Hipotesis**

#### 4.2.4.1. Model 1: Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Publik Terhadap Pembangunan Manusia

Berdasarkan pengolahan data untuk model 1 pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor publik terhadap pembangunan manusia, persamaan didapat dari hasil estimasi dengan menggunakan data panel metode PLS. Terpilihnya metode PLS tersebut sebagai metode yang paling tepat setelah dilakukan proses perbandingan antara metode PLS dengan MET, setelah dilakukan pengujian dengan uji Chow maka metode PLS merupakan metode yang paling tepat, kemudian dilakukan pemeriksaan model supaya memenuhi persyaratan BLUE. Adapun persamaan dengan metode PLS tersebut nampak sebagai berikut (lampiran 3):

$$\begin{aligned} \text{PM} &= 68,17365 - 0,192796 \text{ Pub} \\ (\text{t stat}) & (279,4563) \quad (-4,415573) \\ \text{R-squared} &= 99,5\% \end{aligned}$$

Pengujian hipotesis 1:

1.  $H_0: \beta = 0$ , tidak ada pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor publik (sektor pendidikan dan kesehatan) terhadap pembangunan manusia
2.  $H_1: \beta \neq 0$ , Ada pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor publik (sektor pendidikan dan kesehatan) terhadap pembangunan manusia.

Hasil persamaan tersebut menunjukkan arah koefisien dari variabel bebas yaitu pengeluaran sektor publik yang tidak sesuai dengan hipotesis. Arah koefisien yang tidak sesuai dengan hipotesis tersebut, diduga disebabkan oleh sistem keuangan negara yang nampak dari data APBD di masing-masing propinsi yang mengalokasikan anggarannya relatif kecil (lampiran 1), sehingga tidak berdampak terhadap pembangunan manusia. Sebagaimana kita ketahui sebagian besar alokasi anggaran dialokasikan untuk pengeluaran yang sifatnya rutin (operasional), bukan untuk pengeluaran pembangunan yang salah satunya pengeluaran untuk sektor publik di bidang pendidikan dan kesehatan. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Brata

(2004), dimana pengeluaran pemerintah di sektor publik (pendidikan dan kesehatan) berpengaruh terhadap pembangunan manusia.

Perbedaan hasil penelitian tersebut dikarenakan hasil penelitian Brata menggunakan data pengeluaran pemerintah di sektor publik (pendidikan dan kesehatan) berdasarkan prosentase dari pengeluaran pembangunan. Sebagaimana kita ketahui, pengeluaran pemerintah baik dalam APBN maupun APBD terdiri dari pengeluaran rutin dan pembangunan. Sehingga ketika diperoleh data prosentase sektor pendidikan dan kesehatan terhadap pengeluaran pembangunan maka akan diperoleh angka prosentase pengeluaran yang sangat besar. Berbeda jika data prosentase sektor pendidikan dan kesehatan terhadap keseluruhan pengeluaran pemerintah baik rutin maupun pembangunan maka angka prosentase yang didapat pasti lebih kecil. Dengan mengambil prosentase sektor pendidikan dan kesehatan terhadap total pengeluaran pemerintah tersebut diharapkan akan diperoleh angka sesungguhnya mengenai pengeluaran pemerintah tersebut. Jika digunakan prosentase terhadap pengeluaran pembangunan jelas angka prosentase yang didapat sangat besar. Artinya, hal tersebut tidak menggambarkan kondisi sesungguhnya mengenai pengeluaran pemerintah di sektor publik.

#### **4.2.4.2. Model 2: Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Publik Terhadap Kemiskinan**

Sementara itu, model 2 pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor publik terhadap kemiskinan, persamaan didapat dari hasil estimasi dengan menggunakan data panel metode MER (metode efek random). Terpilihnya metode MER tersebut sebagai metode yang paling tepat setelah dilakukan proses perbandingan, pengujian dan pemeriksaan model. Langkah awal yang digunakan adalah membandingkan antara metode efek tetap dan random. Setelah dilakukan pengujian dengan uji Hausman, maka diperoleh persamaan dengan metode efek random (MER). Mengingat teknik yang dipergunakan dalam MER adalah teknik GLS secara otomatis model yang

dihasilkan terbebas dari masalah heteroskedastisitas dan autokorelasi. Adapun persamaan dengan metode MER tersebut nampak sebagai berikut (lampiran 4):

$$\begin{array}{l} \text{KMS} = 17,00298 + 0,176109\text{PUB} \\ \text{t (stat)} \quad (9,168799) \quad (0,918076) \\ \text{R-squared} \quad 56,14\% \end{array}$$

Pengujian hipotesis 2:

1.  $H_0: \beta = 0$ , Tidak ada pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor publik (sektor pendidikan dan kesehatan) terhadap angka kemiskinan
2.  $H_1: \beta \neq 0$ , Ada pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor publik (sektor pendidikan dan kesehatan) terhadap angka kemiskinan

Dari hasil uji t diketahui nilai sig.(t) sebesar 0,3603 lebih besar dari 0.05 (atau t-statistik  $|0,918076|$  lebih kecil dari 2), maka  $H_0: \beta_1 = 0$  gagal ditolak, yang berarti bahwa pengeluaran pemerintah di sektor publik (pendidikan dan kesehatan) tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan sehingga hipotesis  $H_1: \beta_1 \neq 0$  yang menyatakan bahwa ada pengaruh pengeluaran pemerintah dalam sektor pendidikan dan kesehatan terhadap angka kemiskinan dalam penelitian ini tidak terbukti. Kondisi ini juga tidak terlepas dari sistem keuangan negara yang nampak dari alokasi pengeluaran pemerintah daerah dalam sektor publik (kesehatan dan pendidikan) terhadap total pengeluaran pemerintah masih relatif rendah (lampiran 1). Seperti halnya dengan model 1, dimana pengeluaran pemerintah di sektor publik (pendidikan dan kesehatan), tidak ber pengaruh terhadap pembangunan manusia, begitu juga dengan model 2 dimana pengeluaran pemerintah di sektor publik (pendidikan dan kesehatan), tidak berpengaruh terhadap kemiskinan. Dengan alokasi pengeluaran pemerintah daerah di sektor publik (kesehatan dan pendidikan) yang masih rendah tentunya tidak ada pengaruhnya terhadap tingkat kemiskinan, yang jumlahnya semakin meningkat. Masyarakat miskin, semakin sulit untuk memperoleh akses terhadap pendidikan dan kesehatan, jika alokasi

pengeluaran pemerintah daerah tersebut masih relatif rendah jika dibandingkan pengeluaran-pengeluaran pemerintah lainnya, terutama pengeluaran untuk rutin.

#### 4.2.4.3. Model 3: Pengaruh Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan

Seperti halnya persamaan pada model 1 dan model 2, persamaan pada model 3 pun tidak terlepas dari langkah-langkah yang harus dilakukan pada model 1 dan 2. Langkah awal yang dilakukan adalah dengan adanya perbandingan untuk menentukan dua metode yang digunakan. Kedua model yang terpilih, yaitu model dengan MET dan MER, selanjutnya dibandingkan dengan uji Hausman untuk memilih model yang tepat, sehingga diperoleh model dengan metode efek random. Dengan terpilihnya model menggunakan MER maka tidak diperlukan pemeriksaan model karena secara otomatis MER dengan teknik GLS telah membebaskan model dari autokorelasi dan heteroskedastisitas. Adapun persamaan pada model 3 dengan metode efek random (lampiran 5), yaitu:

$$\begin{array}{l} \mathbf{KMS} = 100,3254 - 1,227304\mathbf{IPM} \\ \mathbf{t(stat)} \quad (7,261748) \quad (-5,980676) \\ \mathbf{R-squared} \quad 61,19\% \end{array}$$

Pengujian hipotesis 3:

1.  $H_0: \beta = 0$ , Tidak ada pengaruh pembangunan manusia terhadap angka kemiskinan.
2.  $H_1: \beta \neq 0$ , Ada pengaruh pembangunan manusia terhadap angka kemiskinan.

Dari hasil uji t diketahui nilai sig.(t) sebesar 0,000 lebih kecil dari 0.05 (atau t-statistik  $|5,980676|$  lebih besar dari 2), maka  $H_1: \beta_1 \neq 0$  diterima, yang berarti bahwa pembangunan manusia berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan. Dilihat dari nilai koefisien beta sebesar -1,227304 menunjukkan bahwa pengaruh indeks pembangunan manusia adalah negatif hal ini sesuai dengan hipotesis. Artinya, ketika indeks pembangunan manusia naik sebesar

satu satuan maka akan mengurangi kemiskinan sebesar 1,227304%, dimana faktor lain tetap.

#### **4.2.5. Nilai-Nilai Islam Dalam Mengatasi Permasalahan Umat Terkait Dengan Kemiskinan**

Berdasarkan hasil analisis data dengan menggunakan teknik analisis kuantitatif terlihat bahwa pembangunan manusia sangat berpengaruh secara signifikan terhadap pengurangan kemiskinan (model persamaan regresi 3). Salah satu langkah yang berguna untuk meningkatkan pembangunan manusia tersebut adalah investasi di sektor publik antara lain di sektor pendidikan dan kesehatan. Investasi sektor publik tersebut dapat diproxy dari pengeluaran pemerintah dalam rangka investasi di kedua sektor tersebut. Namun, berdasarkan hasil analisis data (model persamaan regresi 1 dan 2) terlihat bahwa pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan masih relatif rendah sehingga tidak berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan pembangunan manusia maupun pengurangan kemiskinan. Kondisi ini sekaligus menggambarkan bahwa kebijakan keuangan publik di Indonesia belumlah berpihak terhadap masyarakat miskin. Sehingga investasi publik yang seharusnya bisa membuat masyarakat sejahtera, ternyata bukanlah dijadikan prioritas dalam pengeluaran pemerintah. Sebenarnya Islam telah mengatur kriteria pengeluaran pemerintah yang bisa dijadikan rujukan oleh pemerintah.

Pengeluaran pemerintah dalam Islam tidak akan terlepas dari nilai-nilai Islam, terutama kepada *maqashid* (Chapra, 1999: 310-312). Komitmen kepada nilai-nilai Islam dan *maqashid* akan membantu merangkak dari kesalahan. Pengaruh utama *maqasid* adalah mengurangi kesewenang-wenangan dalam keputusan pengeluaran pemerintah dengan memberikan kriteria untuk menetapkan prioritas. *Maqasid* dapat diterapkan lebih lanjut dengan mengikuti keenam prinsip-prinsip umum berikut ini, yang diadaptasi dari beberapa kaidah hukum yang dikembangkan selama berabad-abad oleh para ahli fiqih untuk

memberikan suatu dasar yang rasional dan konsisten untuk fiqih. Dengan demikian ada beberapa prinsip dalam pengeluaran pemerintah, yaitu:

7. Kriteria dasar bagi seluruh alokasi pengeluaran harus dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat (pasal 58).
8. Menghilangkan kesulitan dan penderitaan harus lebih diutamakan daripada mengejar kesenangan (pasal 17, 18, 19, 20,30, 31 dan 32).
9. Kepentingan umum yang mayoritas harus lebih diutamakan daripada kepentingan segolongan kecil yang minoritas (Pasal 28).
10. Suatu pengorbanan atau kerugian pribadi dapat dilakukan dalam rangka menyelamatkan pengorbanan atau kerugian umum dan suatu bahaya yang lebih besar boleh dihindari dengan menempuh bahaya yang lebih kecil (pasal 26, 27 dan 28).
11. Barangsiapa yang menerima keuntungan harus menanggung biayanya (pasal 87 dan 88).
12. Sesuatu yang tanpanya suatu kewajiban tidak dapat dikerjakan adalah juga wajib.

Kaidah-kaidah fikih ini memiliki dampak yang sangat penting dalam perpajakan dan pengeluaran pemerintah di negara miskin. Untuk menjelaskan implikasi dalam program pengeluaran pemerintah bisa terlihat pada contoh berikut. Kesejahteraan masyarakat harus menjadi tujuan utama dari pengeluaran pemerintah berdasarkan kaidah pertama, maka kaidah keenam menetapkan bahwa semua proyek infrastruktur, baik fisik maupun sosial yang membantu merealisasikan tujuan harus diprioritaskan.

Kaidah kedua proyek infrastruktur tersebut harus diberikan kepada proyek-proyek yang membantu menghapuskan penyebab kesulitan dan penderitaan seperti halnya kekurangan makanan, buta huruf, epidemik dan kurangnya fasilitas kesehatan. Kesenjangan pendapatan dan kekayaan juga harus dikurangi (kaidah keenam), suatu keharusan untuk meningkatkan kemampuan si miskin agar dapat memperoleh pendapatan yang lebih banyak



melalui akses yang lebih besar dan lebih mudah kepada pendidikan dan fasilitas training serta keuangan.

Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut nampak jelas bagaimana sistem keuangan publik dalam Islam sangat berpihak pada masyarakat, terutama dalam mensejahterakan masyarakatnya. Kesejahteraan masyarakat diutamakan sehingga diletakkan pada tujuan yang utama. Selanjutnya apabila terjadi kondisi yang tidak menyenangkan sehingga mengakibatkan terjadinya penderitaan seperti halnya kemiskinan maka pengeluaran untuk mengatasi kemiskinanlah yang akan didahulukan dibandingkan dengan pengeluaran yang ditujukan untuk mengejar kesenangan. Hal ini menunjukkan pemerintah akan mengutamakan investasi publik dalam upaya mengatasi kemiskinan tersebut. Investasi publik tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan akses masyarakat terhadap kapasitas dasar (fasilitas pendidikan dan kesehatan) dan daya beli. Artinya, hal ini berbicara tentang pembangunan manusia. Dengan meningkatnya akses masyarakat miskin terhadap kapasitas dasar dan daya membeli maka akan meningkatkan pembangunan manusia yang pada akhirnya akan mempengaruhi tingkat kemiskinan.

Hal ini sekaligus mengungkapkan bahwa pengentasan miskin bukan saja didekati dengan pendapatan, dimana melalui pemberian uang secara otomatis akan berpengaruh terhadap kemiskinan. Dengan pendekatan tersebut permasalahan kemiskinan tidak serta merta bisa diselesaikan secara tuntas, karena hal tersebut tidak menyelesaikan akar permasalahan dari kemiskinan itu sendiri. Penyelesaian dengan berbasis pendapatan tersebut sifatnya hanya *ad hoc* saja. Sadar akan hal tersebut, banyak dari para ekonom konvensional untuk menyempurnakan secara lebih komprehensif seperti halnya yang tercantum dalam indeks pembangunan manusia. Sebenarnya Islam sendiri jauh lebih dahulu mempunyai konsep mengenai pengentasan kemiskinan secara komprehensif, melalui instrumen zakat. Zakat saat itu merupakan instrumen fiskal yang mampu mensejahterakan masyarakat. Sebagai contoh yaitu daerah Yaman yang merupakan salah satu daerah kekuasaan Khalifah Umar bin

Khattab pada waktu itu tidak ada lagi yang berhak menerima zakat. Selanjutnya dalam periode daulah Bani Umayyah, salah satu khalifahnya, yaitu Umar bin Abdul Aziz (99-101 H) sekitar dua tahun telah berhasil mensejahterakan masyarakatnya dengan dana zakat tersebut, bahkan dana zakat melimpah ruah dalam *baitul maal* sampai menimbulkan kesulitan bagi petugas amil zakat untuk mencari golongan fakir miskin yang membutuhkan (Wahid, 2006).

Target utama dari aplikasi zakat adalah mengentaskan kemiskinan secara keseluruhan dengan mencari pemecahannya diberbagai aspek (Qaradhawi, 2005:26). Melepaskan manusia dari cengkeraman kemiskinan dengan mempersiapkan kehidupan yang sesuai dengan keadaan dan cocok dengan kehormatan dirinya. Sehingga, bisa beribadah kepada Allah dan juga mampu mengemban beban kehidupan, serta menjaganya dari segala cengkraman sesuatu yang diharamkan termasuk segala tipu daya.

Dengan tujuan di atas inilah, maka Allah mewajibkan zakat dan menjadikannya sebagai pondasi terhadap keberlangsungan Islam di muka bumi dengan cara mengambil zakat tersebut dari orang yang mampu dan kaya serta memberikannya kepada fakir miski, demi membantunya dalam menutupi kebutuhan materi. Rasulullah sering menyebutkan tugas pertama ini dalam banyak hadistnya, sebagaimana hadist yang diriwayatkan oleh Mu'ads dalam Qardhawi ( 2005; hal.30) di saat ia diutus untuk pergi ke Yaman dan mendapat perintah untuk mengajarkan kalimat bagi orang masuk Islam, diantara kalimat tersebut berbunyi:

*“Sesungguhnya Allah mewajibkan atas mereka sadaqah (zakat dari harta mereka, yang diambil dari orang yang mampu di antara mereka.” (HR. Jamaah dari Ibnu Abas).*

Berdasarkan hal tersebut jelas makna zakat tersebut mempunyai makna selain yang sifatnya material juga spritual yang merupakan perintah dari Allah untuk orang yang mampu. Melalui instrumen zakat tersebutlah, permasalahan umat yang terkait dengan kemiskinan bisa teratasi. Walaupun demikian bukan berarti

zakat hanya satu-satunya instrumen keuangan publik dalam mengentaskan kemiskinan.

Dalam hal pengentasan kemiskinan tersebut perlu diidentifikasi faktor yang menjadi penyebabnya. Hal ini dianalogikan dengan obat dalam menyembuhkan suatu penyakit. Setiap penyakit mempunyai obat yang berbeda-beda sesuai dengan penyebab yang menyertainya. Suatu obat tidak akan manjur apabila tidak sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan. Dan tidak mungkin membuat spesifikasi suatu obat, apabila tidak diketahui penyebab datangnya penyakit tersebut. Dari hal tersebut dapat dijelaskan bahwa dalam pengentasan kemiskinan perlu diperhatikan apa yang menjadi seseorang itu miskin. Berdasarkan Qaradhawi (2005:31) ada beberapa poin penyebab seseorang miskin:

1. Kemiskinan yang disebabkan oleh adanya pengangguran, baik karena keterpaksaan (*Jabariah*) atau karena suatu pilihan (*Khiyariah*);
  - a. Kemiskinan karena pengangguran yang disebabkan oleh keterpaksaan (*Jabariah*)

Pengangguran yang terjadi dimana seseorang tidak mempunyai sedikitpun memilih status ini, dan diharuskan menerimanya. Pengangguran ini terjadi karena seseorang tidak mempunyai keterampilan sedikitpun sebagai modal dalam mencari penghidupan. Atau bisa jadi seseorang telah mempelajari suatu keterampilan tertentu, namun ia membutuhkan banyak alat yang menunjang keterampilan tersebut. Namun, sayangnya ia tidak mempunyai modal sedikitpun untuk itu.

Dalam hal ini zakat mempunyai peranan yang signifikan sebagai motor penggerak untuk memberikan tunjangan kepada para seseorang yang membutuhkan modal, yang tidak bisa didapatkan dari jalan lain. Peranan zakat bukanlah sekedar memberikan beberapa uang atau beberapa liter beras yang cukup untuk menghidupi seseorang penerima zakat dalam beberapa hari atau minggu. Setelah itu ia kembali kepada kondisi semula dan mengulurkan tangannya menerima bantuan zakat. Sebenarnya peranan zakat itu terletak

pada bagaimana seorang penerima mampu menghidupi dirinya sendiri dengan kemampuan yang dimilikinya. Dan, memiliki penghasilan tetap yang mencukupi kehidupannya.

b. Kemiskinan yang disebabkan oleh Pengangguran *Khiyariah*.

Pilihan seseorang untuk menganggur padahal mampu untuk bekerja. Hal tersebut dikarenakan keinginan untuk berpangku tangan dan bermalasalasan hingga menjadi beban orang lain. Islam sangat memerangi orang-orang seperti mereka dan tidak meridhai sedikitpun atas apa yang mereka lakukan, walaupun banyak di antara mereka beralasan, bahwasannya mereka melakukan hal tersebut demi mengkonsentrasikan diri pada akhirat dan beribadah kepada Allah semata. Sesungguhnya Islam tidak mengenal dunia kerahiban seperti itu.

Yang menjadi poin penting dalam hal tersebut adalah posisi zakat bagi mereka yang bermalasalasan dalam mencari nafkah, padahal mereka memiliki kekuatan dan juga potensi. Dalam Hadist tersebut dikatakan bahwa mereka tidak memiliki sedikit pun bagian dari uang zakat. *Tasawuf* yang benar dan wajib diikuti adalah sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Saw terhadap salah seorang pengemis. Diriwayatkan dari Anas bin Malik, sesungguhnya salah seorang laki-laki dari kaum Anshar mendatangi Rasulullah dan meminta sesuatu kepadanya. Rasulullah bertanya padanya:

*“Apakah kamu tidak memiliki apapun di rumah?” Ia menjawab: “Tentu, kain yang kami pakai sebagian, dan sebagian lainnya kami jadikan alas, dan juga gelas kami tempat kami minum air darinya.” Rasulullah pun berkata: “Bawalah keduanya kepadaku.” Lalu kedua barang tersebut diberikan kepada Rasulullah saw dan beliau pun lalu melelangnya dengan mengatakan: “Siapakah yang ingin membeli kedua barang ini?” Seorang laki-laki berkata: “Aku akan membelinya dengan dua dirham.” Lalu Rasulullah pun menjualnya dan mengambil dua dirham yang kemudian ia berikan kepada laki-laki dari kaum Anshar tersebut, dan berkata: “Belilah dengan dirham pertama ini makanan untuk kau berikan kepada keluargamu, dan dirham lainnya belilah kapak dan bawa kepadaku. “Rasulullah pun lalu menguatkan ikatan ranting dengan tangannya, lalu ia berkata kepada laki-laki tersebut: “pergilah dan carilah kayu bakar, lalu jualah. Aku tidak ingin melihatmu lagi hingga lima belas hari ke depan.” Lalu laki-laki tersebut mencari kayu bakar dan menjualnya”.*

Hingga tiba saatnya, ia pun mendatangi Rasulullah dengan membawa sepuluh dirham di tangannya, yang kemudian sebagian darinya ia belikan makanan.

Melihatnya, Rasulullah Saw berkata:

*"Ini lebih baik bagimu daripada sedekah yang memberikan noda hitam di wajahmu pada hari kiamat!"*

Berdasarkan hadis tersebut tampak jelas dan didapati bahwasannya Rasulullah Saw tidak menganjurkan laki-laki dari kaum Anshar itu mengambil bagian dari zakat, sedang ia mampu untuk bekerja. Zakat pun tidak diperkenankan untuknya, di saat itu mempunyai banyak cara dan jalan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Seorang pemimpin hendaknya memberikan kesempatan bagi seseorang untuk mencari nafkah yang halal dengan memberikan seseorang lowongan pekerjaan.

Hadist ini mempunyai banyak cakupan konsep yang telah digariskan Islam sebelum konsep ini dikenal oleh dunia beberapa abad sebelumnya dan baru muncul sejak kemunculan Islam. Konsep yang ditawarkan Islam adalah konsep yang universal. Islam tidak mengatasi kaum pengemis yang membutuhkan materi yang bersifat sementara, seperti yang banyak dilakukan dengan sekedar menasehati mereka dan kemudian lari menghindari darinya. Namun yang dilakukan justru mengulurkan tangannya untuk mengatasi permasalahan dengan konsep yang efisien:

- Dengan mengajarkan pada setiap peminta-minta dan pengemis untuk mempergunakan segala potensi diri dan kemampuan yang mereka miliki, walaupun hanya sedikit. Juga memberdayakan apa yang mereka miliki, walaupun hanya sekedarnya. Serta tidak menggantungkan diri pada bantuan orang lain di saat ia memiliki sesuatu yang dapat dipergunakan dan dimanfaatkan guna mempermudah pekerjaan yang kiranya dapat menjadi nafkah bagi kehidupannya.
- Dengan mengajarkan, setiap pekerjaan yang baik akan mendatangkan rezeki yang halal. Apabila hanya dengan mencari kayu bakar, mengikat dan lalu

menjualnya mampu mendatangkan rezeki baginya, maka bagaimana ia mampu menghadap Allah dengan segala kemampuannya sedang ia hanya bisa meminta-minta dan mengemis atas bantuan orang lain?

- Dengan mengarahkan, setiap pekerjaan haruslah yang sesuai dengan kepribadian dan juga kemampuan serta lingkungan yang mengelilinginya; dengan menyediakan untuknya alat penunjang bagi pekerjaan yang cocok dan tidak membiarkannya larut dalam kebingungan.
- Dengan memberikannya kesempatan selama lima belas hari untuk mengetahui masa penyesuaian dengan pekerjaan yang baru tersebut, hingga ia dapat memutuskan apakah pekerjaan tersebut cocok baginya. Kemudian ia akan menjalaninya sebagai sumber nafkah atau ia harus menggantinya dengan pekerjaan lain.

2. Kemiskinan yang disebabkan karena ketidakmampuan dalam menutupi dan memenuhi semua kebutuhan hidupnya. Dimana ketidakmampuan tersebut disebabkan oleh salah satu dari beberapa sebab berikut yaitu:

*Pertama;* kemiskinan yang disebabkan oleh kelemahan fisik, yang menjadi penghalang dirinya dalam mendapatkan penghasilan yang besar. Lemah fisiknya dalam arti umur yang masih kecil sedang ia tidak mempunyai keluarga (anak yatim). Ataupun umur yang terlalu tua atau karena ia kehilangan salah satu anggota tubuhnya atau menderita suatu penyakit yang membuatnya tidak mampu seperti orang normal. Orang yang ditimpa kemiskinan karena hal ini berhak mendapatkan zakat, sebagai empati atas kekurangan yang ada padanya hingga ia tidak harus selalu menjadi beban masyarakat. Namun pada zaman sekarang, dengan bantuan ilmu yang berkembang pesat semua hal ini dapat diatasi dengan baik. Banyak penemuan yang memungkinkan bisa membantu orang cacat, sehingga mereka tetap dapat bekerja sesuai dengan keadaan dan kemampuan yang mereka miliki, serta menghindari mereka dari belas kasihan orang lain dan membuat mereka dapat hidup dengan baik dan terhormat. Oleh karena itu, dana zakat yang ada

bisa dipergunakan untuk mengajarkan dan melatih mereka keterampilan yang sesuai dengan bakat dan kondisi.

*Kedua;* kemiskinan yang disebabkan oleh ketidakmampuan untuk mencari pekerjaan, karena ditutupnya pintu-pintu pekerjaan yang halal dengan keadaan para fakir miskin tersebut. Walaupun mereka telah mengupayakannya dengan sekuat tenaga dan mencarinya dengan gigih serta giatnya usaha para pemimpin masyarakat dalam memberikan kesempatan pada mereka dalam membuka lowongan pekerjaan. Mereka tidak diragukan lagi berada dalam posisi yang sangat lemah secara hukum, namun tidak secara kekuatan.

Telah diriwayatkan dari Imam Ahmad dan yang lainnya tentang kisah dua orang laki-laki yang datang kepada Rasulullah Saw dan meminta darinya sadaqah (zakat). Rasulullah menatap keduanya dan lalu menurunkan pandangannya. Ia mendapati keduanya orang yang masih kuat, lalu beliau berkata:

*“Apabila kalian menginginkannya, aku akan memberikannya” Zakat tidak diperuntukkan untuk orang yang mampu (kaya) dan juga orang yang mampu bekerja”. Seseorang yang mampu bekerja tidak berhak mendapatkan zakat. Namun apabila ternyata orang yang mampu bekerja tetapi tidak mendapatkan pekerjaan, atau ia menemukan pekerjaan namun bukan pekerjaan yang diperbolehkan atau bisa jadi ia menemukan pekerjaan, namun pekerjaannya itu tidak sesuai dengan kedudukannya di mata masyarakat, atau ia mendapatkan pekerjaan namun membebaninya di luar batas kemampuannya, maka ia boleh mendapatkan zakat.*

*Ketiga;* kemiskinan yang ketiga ini bukan disebabkan karena pengangguran atau karena ia tidak menemukan pekerjaan yang sesuai, tetapi pada kenyataannya ia bekerja dan mendapatkan penghasilan tetap. Namun sayangnya penghasilan dan pemasukkan tidak seimbang dengan pengeluaran. Pendapatannya tidak mampu memenuhi semua kebutuhannya dan tidak mampu mewujudkan kecukupan, sebagaimana yang banyak dialami oleh

buruh, petani dan juga pekerja rendah ataupun wiraswasta kecil. Mereka yang berada dalam kondisi tersebut, boleh mendapatkan zakat; kondisi mereka adalah keadaan dimana tiada seorang pun akan menoleh kepadanya dan masyarakat pun tidak akan menggolongkan mereka ke dalam golongan fakir miskin.

Sangat keliru, jika masyarakat selama ini menganggap zakat akan membuat seseorang malas dan hanya mengandalkan pemberian dari zakat. Zakat seharusnya bisa membuat seseorang tersebut mandiri terutama bagi orang-orang yang mempunyai fisik yang kuat untuk berusaha. Dari berbagai solusi yang ditawarkan tersebut, banyak konsep mendasar yang mampu memecahkan permasalahan umat yang terkait dengan kemiskinan yang saat ini sedang menimpa umat Islam. Di tengah tingginya angka kemiskinan, penanggulangan kemiskinan yang ditawarkan Islam cukup relevan. Kontroversi mengenai bantuan langsung tunai (BLT) untuk mengatasi kemiskinan bisa didekati dengan pendekatan ini. Melalui pendekatan BLT tersebut, penanggulangan kemiskinan hanya merupakan permasalahan pendapatan, sehingga pendekatan yang digunakan harus berbasis pendapatan pula, yang sebenarnya tidak menyelesaikan akar permasalahan mengapa seseorang tersebut miskin. Seharusnya pendekatan yang digunakan lebih komprehensif bukan sekedar bantuan yang sifatnya temporer dan *ad hoc* yang setelah program tersebut selesai masyarakat miskin kembali miskin. Justeru yang ada dalam masyarakat akan tertanam budaya tidak malu untuk menganggap dirinya miskin hanya untuk mendapat BLT tersebut. Hal tersebut tentunya harus dihindari. Kondisi tersebut pun terjadi pada zaman Rasulullah (Qaradhawi, 2005:34). Dan Allah juga berfirman dalam QS Al-Baqarah ayat 273:

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أَحْصَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ  
الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا  
تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٢٧٣﴾



(Berinfaklah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di muka bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui.

Dimaksud dengan tidak meminta secara mendesak adalah tidak mendesak akan suatu hal, serta tidak membebani orang lain akan apa yang mereka tidak butuhkan. Maka bagi siapa yang telah meminta sesuatu hal namun ia sendiri belum membutuhkannya, maka sesungguhnya ia telah mendesak dan membebani orang. Inilah pensifatan yang digambarkan dan diletakan pada fakir miskin dari kaum Muhajirin yang lebih menkonsentrasikan diri untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya padahal mereka tidak mempunyai uang atau pekerjaan yang memenuhi kebutuhan mereka.

Mereka dan orang sejenis merekalah yang sebenarnya lebih pantas untuk dibantu, sebagaimana Rasulullah Saw mengarahkan dan menjelaskannya dalam hadist di atas.

Dalam satu riwayat lain, Rasulullah Saw Bersabda:

*“Bukanlah dianggap miskin, seorang yang mendatangi banyak orang, lalu ia berikan satu -dua potong roti ataupun satu –dua butir kurma. Sesungguhnya orang yang miskin adalah orang yang tidak membutuhkan orang lain ataupun mencari orang lain untuk memberikan sedekah padanya, juga tidak meminta belas kasihan orang lain.”*

Mereka sebenarnya orang-orang miskin yang pantas mendapatkan bantuan, walaupun banyak orang yang lupa dan tidak begitu mempedulikan keadaan mereka. Jumlah mereka sangat banyak namun tidak tampak di permukaan. Karena mereka adalah orang-orang yang sangat menjunjung kemuliaan diri untuk tidak meminta bantuan orang lain ataupun untuk emmplihatkan kebutuhan mereka yang belum terpenuhi.

Nampak jelas jika pendekatan yang digunakan dalam mengatasi kemiskinan hanya bersandar pada pemberian uang seperti halnya BLT justeru akan banyak menimbulkan permasalahan sementara akar penyebab kemiskinan

itu sendiri tidak teratasi. Berdasarkan hasil penelitian terungkap bahwa pembangunan manusia akan berpengaruh secara signifikan terhadap pengurangan kemiskinan. Dikaitkan dengan nilai-nilai Islam dalam mengatasi persoalan kemiskinan, setidaknya konsep pembangunan manusia tersebut cenderung mendekati konsep dalam Islam ketika mengatasi permasalahan kemiskinan.

Pembangunan manusia yang tercermin dari indeks pembangunan manusia tidak sekedar menekankan pada peningkatan pendapatan saja, melainkan ada dua aspek lainnya yang mendapat perhatian yaitu pendidikan dan kesehatan. Walaupun masih belum bisa dikatakan komprehensif, namun konsep pembangunan tersebut setidaknya sudah mempertimbangkan aspek lainnya disamping aspek pendapatan. Perspektif kemiskinan dari konsep pembangunan manusia berarti pengabaian terhadap pilihan dan kesempatan untuk kehidupan yang dapat ditoleransi. Dengan demikian, konsep kemiskinan dalam pembangunan ekonomi mempunyai dimensi yang terkait dengan umur pendek, kekurangan akses terhadap pendidikan dasar dan kekurangan akses terhadap sumberdaya publik maupun *private*. Hal inilah yang ditangkap dalam *The human poverty index* (HPI).

Dalam konteks kekinian, secara teknis bisa dikatakan konsep pembangunan manusia telah mendekati konsep Islam dalam mengatasi kemiskinan dengan instrumen zakatnya. Walaupun demikian banyak aspek teknis lainnya yang belum tertangkap dalam konsep ini dan cenderung mensesederhanakan permasalahan yang terkait dengan kemiskinan. Namun setidaknya konsep pembangunan manusia dalam mengatasi kemiskinan ini lebih komprehensif dari sekedar pendekatan yang berbasis pendapatan, yang memberikan sejumlah uang tertentu untuk meningkatkan daya beli masyarakat, sehingga permasalahan kemiskinan dapat teratasi. Disamping kelemahan pada aspek teknis yang masih kental dengan nuansa materialisme sehingga harus terus disempurnakan, aspek moral spritual juga belum terungkap dalam konsep pembangunan manusia tersebut. Dalam Islam, landasan dari konsep

pembangunan manusia tidak bisa dilepaskan dari syari'ah. Mengingat tujuan syari'ah adalah meningkatkan kesejahteraan manusia, yang terletak pada perlindungan iman, hidup, akal, keturunan dan harta. Apa saja yang memantapkan perlindungan kelima hal ini merupakan kemaslahatan umum dan dikehendaki (Al-Ghazali dalam Chapra: 1999). Lebih jauh mengenai konsep pembangunan manusia dalam Islam, alangkah baiknya dengan mengambil pendapat dari Haritsi (2003). Menurutnya, urgensi sumber daya insani dan pengembangannya di dalam Islam akan nampak jelas ketika mencermati lima tujuan umum syariah; di mana tiga dari lima tujuan tersebut adalah mengarah langsung kepada pengembangan sumberdaya manusia; yaitu melindungi jiwa, melindungi akal, dan melindungi keturunan. Sedangkan dua yang lainnya, yaitu melindungi agama dan melindungi harta adalah sebagai dua keharusan bagi pengembangan sumber daya insani dan pembentuknya dengan pembentukan yang selamat. Atas dasar ini dapat dikatakan bahwa tujuan umum syariah adalah untuk mengembangkan manusia secara komprehensif, baik jiwa maupun raga. Untuk mencapai hal tersebut maka konsep pembangunan manusia yang ada saat ini perlu disempurnakan, sehingga bisa mencapai tujuan yang sesuai dengan syariah, dengan menjaga keseimbangan antara jiwa dan raga.

Walaupun demikian tidak diadopsinya zakat dalam sistem fiskal telah membuat umat Islam kehilangan salah satu instrumen untuk mensejahterakan masyarakatnya. Menurut Nasution et. al. (2006:206), dalam hal pengelolaan keuangan publik, dunia Islam dewasa ini kehilangan minimal dua hal yaitu hilangnya spirit religiositas dan kehilangan mekanisme teknis yang bermanfaat. Pertama, hilangnya spirit religiositas dalam pemenuhan dan penggunaan keuangan negara disebabkan oleh pandangan sekularisme yang melanda dunia Islam, hal ini menyebabkan dunia Islam kehilangan daya dorong internal yang vital. Kedua, tidak digunakannya berbagai mekanisme yang berbau Islam, justru dunia Islam kehilangan metode menyejahterakan rakyatnya.

Sebagai contoh, tidak diadopsinya zakat ke dalam sistem ketatanegaraan, menyebabkan dunia Islam kehilangan kekuatan untuk menjalankan program *welfare*. Program kesejahteraan untuk memecahkan masalah kemiskinan dan bencana yang meliputi kesehatan, pangan, balita, dan manula tidak dikenal dengan standar yang memuaskan di seluruh dunia.

Menghilangnya religiositas dari panggung ketatanegaraan dengan serta merta mengadopsi sekularisme dan materialisme yang tidak dipahami mendorong moralitas yang bobrok. Korupsi yang berupa perlawanan terhadap aturan legal (*mark up*, penyelewengan, pembobolan, komisi, dan sebagainya) sangat mencoreng dan memalukan dunia Islam. Korupsi yang legal menyangkut angka yang lebih besar lagi yaitu tidak dipahaminya visi dan misi pemerintahan dengan baik. Akibatnya 70 persen dana negara secara legal/sistematis tidak ditujukan kepada pelayanan dan kesejahteraan rakyat. Dana-dana ini diizinkan secara legal untuk digunakan secara elitis dan bias kepada kekuasaan (setiaji, 2005 dalam Nasution et.al., 2006:207). Kondisi tersebut akan berbeda jika zakat bisa dijadikan sebagai komponen utama dalam sistem keuangan publik Islami, mengingat instrumen zakat bukanlah suatu kegiatan yang semata-mata untuk tujuan duniawi semata tetapi juga mempunyai implikasi untuk kehidupan di akhirat. Hal inilah yang membedakan kebijakan fiskal dalam Islam dengan kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi konvensional. Allah berfirman dalam QS. At Taubah ayat 103 berikut ini:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendo`alah untuk mereka. Sesungguhnya do`a kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Ajaran Islam yang sarat dengan pesan-pesan moral tersebut sangat diperlukan dalam pengelolaan keuangan publik sehingga bisa terhindar dari apa yang disebut korupsi. Besarnya angka korupsi membuat tujuan

mensejahterakan masyarakat akan semakin sulit terwujud mengingat masyarakat harus menanggung biaya yang lebih besar akibat adanya mis alokasi anggaran tersebut.

